



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Maret 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS TANJUNGPURA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : CUCU SUHERY
2. Jabatan : WAKIL DEKAN BIDANG KEMAHASISWAAN
3. NHK : 841040

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 745.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 156 m2/70 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 600 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 65.000.000
3. Tanah Seluas 360 m2 di KAB / KOTA PONTIANAK, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
4. Tanah Seluas 240 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
5. Tanah Seluas 244 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
6. Tanah Seluas 1007 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
7. Tanah Seluas 5881 m2 di KAB / KOTA KUBU RAYA, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 21.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, WARISAN Rp. 3.000.000
2. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 18.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 37.500.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 114.485.792



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 917.985.792

III. HUTANG

Rp. 30.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 887.985.792

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.